

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP AGEN ASURANSI
DENGAN PT BHINNEKA LIFE DALAM MELAKUKAN
PEKERJAAN DENGAN SISTEM KONTRAK**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
Pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

HERU SETYAWAN

C100130121

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP AGEN ASURANSI DENGAN
PT BHINNEKA LIFE DALAM MELAKUKAN PEKERJAAN
DENGAN SISTEM KONTRAK**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

HERU SETYAWAN

C100130121

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Inayah', with a stylized flourish at the end.

(Inayah, S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP AGEN ASURANSI DENGAN
PT BHINNEKA LIFE DALAM MELAKUKAN PEKERJAAN
DENGAN SISTEM KONTRAK**

Oleh:

HERU SETYAWAN

C100130121

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari: Selasa 12 Februari 2019

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. **Inayah, S.H., M.H.**

(Ketua Dewan Penguji)

2. **Septarina Budiwati, S.H., M.H**

(Anggota I Dewan Penguji)

3. **Darsono, S.H., M.H**

(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 12 Februari 2019

Penulis,



HERU SETYAWAN

C100130121

TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP AGEN ASURANSI DENGAN PT BHINNEKA LIFE DALAM MELAKUKAN PEKERJAAN DENGAN SISTEM KONTRAK

Abstrak

Semakin meningkatnya jumlah perusahaan asuransi dan banyaknya jenis penawaran yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi, mengindikasikan bahwa usaha perasuransian mulai banyak diminati masyarakat. Salah satu cara menawarkan produk asuransi yakni dilakukan melalui agen asuransi. Maka dari itu untuk dapat mengetahui mengenai usaha perasuransian, penelitian ini akan membahas mengenai: (1) Proses perjanjian keagenan antara agen dengan PT Bhinneka Life; (2) Hak dan kewajiban masing-masing pihak; dan (3) Tanggungjawab hukum bagi keduanya apabila melanggar perjanjian. Adapun dalam hal ini penulis akan mengkajinya dengan metode pendekatan normatif yakni dengan melakukan pendekatan mengenai asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam surat perjanjian keagenan dengan sistem kontrak antara PT Bhinneka Life dengan agen asuransi. Walaupun pada dasarnya regulasi perasuransian telah diatur dalam UU RI No. 40 Tahun 2014 Tentang Usaha Perasuransian, namun di dalamnya masih sangat sedikit menjelaskan mengenai kedudukan dan hak agen asuransi. Sehingga hal ini dapat bersifat merugikan salah satu pihak khususnya agen asuransi. Maka dari itu, untuk menciptakan sebuah usaha perasuransian yang adil bagi semua pihak, perlu adanya sebuah regulasi tambahan yang mengatur dan melindungi hak agen asuransi.

Kata Kunci: tanggungjawab hukum, asuransi, agen, perusahaan, kontrak kerja

Abstract

The increasing number of insurance companies and the many types of offers offered by insurance companies, indicate that the insurance business is starting to attract a lot of people. One way to offer insurance products is done through an insurance agent. Therefore to be able to find out about insurance business, this research will discuss about: (1) The process of agency agreements between agents and PT Bhinneka Life; (2) The rights and obligations of each party; and (3) The legal responsibility for both if it violates the agreement. As for in this case the writer will study it using a normative approach, namely by approaching legal principles and legal rules contained in the agency agreement with the contract system between PT Bhinneka Life and insurance agents. Although basically the insurance regulation has been regulated in Republic of Indonesia Law Regulation No. 40 of 2014 concerning Insurance Business, but in it is still very little explained about the position and rights of insurance agents. So that this can be detrimental to one party, especially insurance agents. Therefore, to create an insurance business that is fair to all parties, it is necessary to have an additional regulation that regulates and protects the rights of insurance agents.

Keywords: Legal Responsibility, Insurance, Agent, Company, Employment Contract

1. PENDAHULUAN

Dalam regulasi hukum di Indonesia, usaha perasuransian pada awalnya diatur dalam Undang-Undang Negara RI No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, dimana permasalahan hukum kian kompleks, maka undang-undang usaha perasuransian tersebut diperbaharui menjadi Undang-Undang Negara RI No. 40 Tahun 2014. Dengan diterbitkannya undang-undang usaha perasuransian yang baru, dapat diamati bahwasanya peran dan kedudukan agen asuransi sudah mulai dimuat di dalam undang-undang tersebut.

Hal ini jauh berbeda dengan undang-undang sebelumnya yang dimana peran dan kedudukan agen masih sangat sedikit dibahas. Namun demikian, bukan berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 sudah cukup untuk mengatur segala sektor terkait usaha perasuransian baik dari perusahaan, agen, tertanggung, dan pihak-pihak yang terkait dalam usaha perasuransian. Peran dan kedudukan seorang agen asuransi saat ini bisa di katakan masih membutuhkan banyak perlindungan dan kepastian hukum, dikarenakan seorang agen asuransi yang bekerja untuk perusahaan asuransi kurang mendapatkan kesejahteraan jika dibanding dengan beban kerja yang harus dilakukan.

Status agen yang dapat dikatakan hanya sebatas mitra kerja, justru mendapat porsi kinerja yang menyerupai pekerjaan para tenaga kerja pada umumnya. Jika tenaga kerja dalam menjalankan pekerjaannya, sudah diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan, tidak halnya dengan agen asuransi. Hak daripada agen yang sebatas mendapat remunerasi yang dibayarkan setiap tahunnya oleh perusahaan, mengakibatkan kedudukan agen terkadang menjadi kian tidak menentu. Dari situlah peran dari perlindungan hukum terhadap agen haruslah mendapat kepastian hukum seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke empat pasal 27 ayat (2) yang berbunyi: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Di Indonesia sendiri jumlah perusahaan asuransi bisa dikatakan sudah banyak. Adapun badan hukum yang bergerak di bidang usaha perasuransian dalam hal ini yang akan di bahas yakni PT Bhinneka Life yang merupakan perusahaan asuransi yang

sudah besar dan berpengalaman di bidang asuransi. Untuk itu dalam hal ini penulis mengambil judul penelitian yakni; Tanggung Jawab Hukum Terhadap Agen Asuransi Dengan Pt Bhinneka Life Dalam Melakukan Pekerjaan Dengan Sistem Kontrak.

2. METODE

Kemudian terkait jenisnya, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu “Penelitian yang bersifat melukiskan atau dapat dikatakan tidak jauh berbeda dari sifat menjelajah” (Hadikusuma, 1995). Metode Pendekatan dalam skripsi ini menggunakan metode normatif, yaitu “Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem” (Soekanto, 2006). Dalam hal ini penulis akan mengkaji surat perjanjian keagenan antara PT Bhinneka Life dengan agen asuransi. Adapun untuk penyusunannya menggunakan teknik pengumpulan data literatur atau kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan sekunder (Fajar dan Achmad, 2010).

Dalam melakukan analisa, penulis menggunakan analisa data secara kualitatif yang dimana peraturan-peraturan dalam hukum primer, yakni literatur terkait tanggungjawab hukum terhadap agen asuransi dengan PT Bhinneka Life, akan dipadukan dengan pendapat responden di lapangan yakni hasil wawancara, yang nantinya akan dianalisa untuk kemudian dicari pemecahannya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Profil PT Bhinneka Life

Jika dilihat dari sejarahnya, PT Bhinneka Life didirikan sejak 22 Oktober 2016. PT yang bergerak dalam jasa Asuransi ini dulunya bernama PT Asuransi Jiwa Bumiputera (AJB 1912). Akan tetapi dikarenakan adanya permasalahan internal perusahaan yang dimana kondisi Perusahaan dapat dikatakan sedang sakit (tidak sehat) berdasarkan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 harus mengalami restrukturisasi perusahaan untuk menyelamatkan kondisi perusahaan

dengan menggandeng PT Evergreen Invesco Tbk. (Gren), hingga berganti nama menjadi PT Asuransi Jiwa Bumiputera (AJB).

Setelah melewati kondisi terpuruk, akhirnya PT AJB yang resmi berganti nama menjadi PT Bhinneka Life sendiri sampai saat ini telah memiliki nasabah dengan melindungi lebih dari 92.000 pemegang polis. Pada akhir 2017 (*unaudited Financial Report*), Bhinneka Life mengelola aset/kekayaan perusahaan mencapai nilai Rp 1,23 Triliun dengan dukungan Modal disetor sebesar Rp 600 Milyar. Sedangkan tingkat kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban (RBC) tercatat lebih dari 400%, melebihi ketentuan yang ditetapkan pemerintah (*unaudited* per Desember 2017) sebesar 120%. PT Bhinneka Life sendiri sampai saat ini telah memiliki 25 kantor wilayah dan 358 kantor cabang yang didukung lebih dari 17.000 agen dan 1.100 karyawan.

Untuk jenis asuransi yang di sediakan oleh PT Bhinneka Life itu sendiri meliputi: (1) Asuransi Proteksi dan Investasi; (2) Asuransi Akumulasi Harta Kekayaan; (3) Asuransi Jiwa Keluarga; (4) Asuransi Pendidikan; (5) Asuransi Kesehatan; (6) Asuransi Masa Depan. Adapun untuk jenjang yang harus dilalui seorang agen agar sampai pada tingkat tertinggi, maka agen asuransi akan mendapat jabatan yakni sebagai berikut: (1) *Financial Consultant (FC)*; (2) *Agency Manager (AM)*; (3) *Senior Agency Manager (SAM)*; dan (4) *Regional Agency Manager (RAM)* atau *Agency Director (AD)*.

3.2 Proses Perjanjian Kerja Dengan Sistem Kontrak Antara PT Bhinneka Life Selaku Pemberi Kerja Dengan Agen Asuransi

Dalam menjalankan sebuah perjanjian kerja antara PT Bhinneka Life dan agen, secara prosedur diawali dengan sistem perekrutan. Perekrutan ini pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 yang pada intinya menyebutkan bahwa: (1) Setiap agen asuransi hanya dapat menjadi agen dari satu perusahaan asuransi saja; (2) Agen asuransi wajib memiliki perjanjian keagenan dengan perusahaan asuransi yang diageninya; (3) Semua tindakan agen asuransi yang berkaitan dengan transaksi asuransi menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi yang diageninya; (4) Agen asuransi dalam menjalankan kegiatannya harus memberikan

keterangan yang benar dan jelas kepada calon tertanggung tentang program asuransi yang dipasarkan dan ketentuan isi polis, termasuk hak dan kewajiban calon tertanggung tersebut.

Adapun syarat yang biasanya harus dapat dipenuhi bagi calon agen menurut Endang, yakni meliputi: (1) Bergabung dengan Agensi Asuransi PT Bhinneka Life; (2) Menguasai Produk dengan Baik; (3) Memiliki Kemampuan Berkomunikasi yang Baik (4) Menjadi Pendengar yang Baik. Menurut Endang yang mejabat di bagian SDM PT. Bhinneka Life Cabang Boyolali yang dimana ia mengatakan:

“Untuk proses perkrutan hingga penandatanganan perjanjian, calon agen atau dalam hal ini disebut sebagai agen harus melalui seleksi yang cukup ketat. Guna mendapatkan seorang agen yang berkompeten dan ulet dalam memasarkan produk asuransi. Hal ini dikarenakan agen kita merupakan mitra kerja dari Perusahaan”.

Selanjutnya dalam pembuatan perjanjian tersebut, pihak pertama yang kemudian disebut sebagai ‘Perusahaan’ yang memangku jabatan Regional Manager (RM), diwakili oleh W. Sumedi. Adapun pihak kedua yang yang menyepakati perjanjian keagenan adalah Triyono yang selanjutnya disebut ‘Agen’. Perjanjian keagenan antara Triyono dan W. Sumedi, lebih lanjut tertuang dalam Perjanjian Keagenan PT. Bhinneka Life dengan nomor Surat Perjanjian yaitu: 0047/NFZ/GA/2017 yang dibuat pada hari Minggu, tanggal 24 Juli 2018.

Dalam hal ini Perjanjian Keagenan tersebut pada dasarnya merupakan perjanjian baku. Adapun yang dimaksud perjanjian baku yaitu “Perjanjian yang klausul-klausulnya telah ditetapkan atau dirancang oleh salah satu pihak. Penggunaan perjanjian baku dalam perjanjian-perjanjian yang biasanya dilakukan oleh pihak yang melakukan perjanjian yang sama terhadap pihak lain, dalam Pasal 1338 (1) BW bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”.

Selanjutnya terkait kedudukan seorang agen asuransi yakni dalam Pasal 1 Angka 28 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Usaha Perasuransian dijelaskan bahwa “Agen Asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada

badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah”.

Kemudian jika ditinjau dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tertuang dalam Peraturan No. 69/POJK.05/2016 Pasal 1 angka 25, yang dimaksud dengan Agen Asuransi adalah “Orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian”.

Dari dua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwasanya kedudukan seorang agen ‘Tidak termasuk dalam kategori tenaga kerja’ seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kedudukan agen disini merupakan mitra usaha atau mitra kerja. Maka dari itu untuk mengatur bentuk perjanjian keagenan tersebut perlu adanya sebuah perjanjian keagenan. Dikarenakan tidak termasuk dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) seperti yang diatur Undang-Undang Ketenagakerjaan, maka dasar hukum yang dipergunakan dalam perjanjian keagenan tersebut yakni bersumber dari Pasal 1320 KUHPerdata.

Dalam Pasal 1320 KUHPerdata telah dijelaskan bahwasanya untuk menjadikan sebuah perjanjian menjadi sah dihadapan hukum, maka perlu dipenuhinya ketentuan-ketentuan sebagai berikut: Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; Suatu hal tertentu; Sebab yang halal.

Kemudian apabila dibandingkan dengan kedudukan seorang tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan asuransi, maka akan banyak perbandingan yang tidak dimiliki oleh agen asuransi terkait haknya, yang diantaranya: Pendapatan agen asuransi yakni berasal dari banyaknya nasabah yang dapat menjadi nasabah dan pemegang premi asuransi perusahaan asuransi; Status hubungan kerja agen hanyalah mitra kerja, jadi tidak memiliki payung hukum selain dari Undang-Undang

Perasuransian; Tidak adanya jaminan kesejahteraan jangka panjang terhadap agen asuransi; Tingginya tuntutan akan target dalam memasarkan produk asuransi dan beratnya beban kerja yang harus di jalankan oleh agen; Agen dihadapkan oleh perjanjian baku yang dimana tidak memiliki kesempatan dalam melakukan revisi terhadap perjanjian keagenan; dan agen asuransi hanya mendapatkan remunerasi yang dimana besaran remunerasi tersebut tidaklah menentu.

3.3 Hak dan Kewajiban Dari Masing-masing Pihak di Dalam Perjanjian Keagenan dan Peraturan Yang Berlaku di PT Bhinneka Life

Disini penulis akan menjelaskan kewajiban dari seorang agen asuransi PT Bhinneka Life yang harus dijalankan terhadap PT Bhinneka Life, yang dimana hal tersebut telah tertuang dalam Perjanjian Keagenan PT Bhinneka Life Pasal 5 yang diantaranya mewajibkan agen yaitu diantaranya:

- 3.3.1 Seorang agen harus memiliki sertifikat (lisensi) dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- 3.3.2 Menawarkan dan memasarkan produk asuransi;
- 3.3.3 Mengikuti berbagai macam pelatihan yang telah ditentukan perusahaan;
- 3.3.4 Mendistribusikan surat terkait polis asuransi dari nasabah kepada perusahaan;
- 3.3.5 Bekerja secara profesional dan loyal kepada perusahaan;
- 3.3.6 Patuh, tunduk, dan mau menjalankan Kode Etik Keagenan dengan penuh rasa tanggungjawab; dan
- 3.3.7 Bersifat kooperatif dengan perusahaan dalam melaporkan data apabila diperlukan dalam proses investigasi.

Terkait hak apa saja yang didapat oleh seorang Agen saat menjalankan isi perjanjian keagenan tersebut, hanya diatur beberapa hak dari agen. Dalam Perjanjian Keagenan ini hanya diatur dalam satu pasal saja yakni dalam Pasal 8 Perjanjian Keagenan PT Bhinneka Life yang berisi tentang Remunerasi yang berbunyi: “Selama berlangsungnya Perjanjian ini Agen berhak menerima dari Perusahaan Remunerasi (dalam bentuk komisi dan *override*) dan sumbangan kesejahteraan yang akan diatur berdasarkan kebijakan Perusahaan yang akan dikeluarkan dari waktu ke waktu”.

Jika memperhatikan garis besar dari kewajiban seorang agen, dalam perjanjian keagenan ini tidak disebutkan perihal soal gaji yang menjadi kewajiban dari pemberi kerja. Akan tetapi seorang agen asuransi pada dasarnya bukanlah tenaga kerja, jadi dalam Perjanjian Keagenan ini, keuntungan bagi Agen hanya berupa Remunerasi. Hal ini seperti hasil wawancara dengan Ibu Endang Sularmi yang mengatakan:

“Kalau bicara tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan, kita lihat lebih dulu Pasal 1 di dalam perjanjian keagenan ini. Disitu menyebutkan bahwa perjanjian keagenan dengan sistem kontrak ini bukan merupakan perjanjian ketenagakerjaan. Perihal gaji, seorang agen tetap mendapatkannya akan tetapi dalam bentuk remunerasi yakni komisi dan override. Tapi dengan catatan, Remunerasi berupa komisi dan override akan diberikan kalau target kami dapat dipenuhi oleh Agen”.

Kemudian jika diamati dalam UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Usaha Perasuransian, kewajiban Perusahaan Asuransi diantaranya dapat dilihat dalam Pasal 11 di bawah ini yang berbunyi: (1) Perusahaan Perasuransian wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik; (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Jika dilihat dari isi pasal di atas, maka tidak ada pembahasan mengenai kewajiban secara rinci mengenai kewajiban Perusahaan terhadap agen. Jadi dengan demikian dapat dikatakan, kedudukan UU No. 40 Tahun 2014 kurang kompleks dalam membahas hubungan kerja kemitraan antara Agen dengan Perusahaan Asuransi. Sehingga dalam hal ini perlu adanya Peraturan Pemerintah guna menutup kekurangan dari undang-undang usaha perasuransian.

3.4 Tanggung Jawab Hukum Ketika Salah Satu Pihak Antara Agen Asuransi dan PT Bhineka Life Apabila Melanggar Perjanjian Kontrak

Berbicara mengenai tanggungjawab maka erat kaitannya dengan kesalahan. Apabila kesalahan yang dilakukan salah satu pihak mengandung unsur tindak pidana, maka sistem peradilan pidanalah yang akan diterapkan. Namun jika kesalahan tersebut sebatas pelanggaran terhadap isi perjanjian atau wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum, maka penyelesaiannya sudah diatur dalam Pasal 13 Perjanjian Keagenan PT Bhinneka Life. Adapun yang dimaksud dengan sanksi yakni sanksi yang

diatur oleh Perusahaan dan belum mengacu pada UU Usaha Perasuransian. Menurut Endang Sularmi:

“Sanksi itu diberikan dan berlaku bagi para agen yang melanggar ketentuan dalam perjanjian ini, kalau misalkan ranahnya sudah sampai jenjang yang lebih luas, maka tetap yang digunakan bisa KUHPerdara atau KUHP sesuai jenis pelanggarannya”.

Apabila sanksi telah diterapkan, dalam proses selanjutnya yakni dilanjutkan dengan penerapan sistem ganti kerugian. Dalam setiap hal yang mengakibatkan kerugian, maka perlu adanya pertanggungjawaban hukum baik secara pidana maupun perdata. Dalam Perjanjian Keagenan ini, masalah ganti kerugian untuk selanjutnya diatur dalam Pasal 16, yang berbunyi:

- (1) Apabila Agen melakukan suatu tindakan yang menyebabkan kerugian bagi Perusahaan maka Agen berkewajiban untuk mengganti seluruh kerugian yang dialami oleh Perusahaan yang disebabkan oleh tindakan Agen tersebut;
- (2) Apabila orang yang dipimpin oleh Agen lurus ke bawah dalam kelompok pemasaran yang bersangkutan melakukan suatu tindakan yang menyebabkan kerugian bagi Perusahaan maka Agen bersama-sama dengan orang yang menyebabkan terjadinya kerugian tersebut dan semua pengawas/Pembina orang tersebut lurus ke atas dalam kelompok pemasaran yang bersangkutan berkewajiban secara tanggung renteng untuk mengganti seluruh kerugian yang dialami oleh Perusahaan;
- (3) Agen dengan ini membebaskan Perusahaan dari semua kerugian/kewajiban yang timbul dari kesalahan Agen atau orang yang dipimpin oleh Agen.

Kemudian ketika sanksi tersebut telah dijatuhkan, dalam proses selanjutnya yakni dilanjutkan dengan penerapan sistem ganti kerugian. Dalam setiap hal yang mengakibatkan kerugian, maka perlu adanya pertanggungjawaban hukum baik secara pidana maupun perdata. Dalam Perjanjian Keagenan ini, masalah ganti kerugian untuk selanjutnya diatur dalam Pasal 16, yang berbunyi: “Apabila Agen melakukan suatu tindakan yang menyebabkan kerugian bagi Perusahaan maka Agen berkewajiban untuk mengganti seluruh kerugian yang dialami oleh Perusahaan yang disebabkan oleh tindakan Agen tersebut”.

Dari Pasal 16 tersebut dapat dilihat bahwasanya pertanggungjawaban terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh agen, harus dipertanggungjawabkan secara tanggung

renteng baik itu secara vertikal maupun horizontal. Sedangkan Pasal 16 ayat (3) justru memuat klausul bahwasanya Perusahaan yakni PT Bhinneka Life, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dengan alasan apapun. Padahal dalam hal ini kedudukan para pihak disebut sebagai ‘Mitra Kerja’, yang seharusnya semua risiko dan akibat hukumnya harus ditanggung bersama.

Selanjutnya dari keseluruhan jenis pertanggungjawaban hukum berdasarkan jenisnya, ada pengecualian terhadap pertanggungjawaban hukum dalam hal ini. Pengecualian tersebut yakni terkait pertanggungjawaban yang diakibatkan dari adanya suatu Keadaan Kahar akibat dari adanya kondisi *overmacht*. Yang perlu ditekankan, pengecualian ini hanya berlaku jika terjadi suatu keadaan kahar atau dalam hukum biasa disebut dengan *Force Majeure*. Selain dari keadaan kahar, maka pengecualian terhadap pertanggungjawaban hukum tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Dalam Perjanjian Keagenan ini, keadaan kahar sudah diatur pula dalam Pasal 21 yang berbunyi: “Yang dimaksud dengan keadaan Kahar atau *Force Majeure* adalah kejadian-kejadian yang diluar kehendak dan kekuasaan para pihak termasuk namun terbatas pada kejadian bencana alam gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, angin topan, wabah penyakit, tetapi juga meliputi pemogokan, sabotase, huru-hara akibat politik, dan tindakan pemerintah di bidang moneter, sehingga salah satu Pihak atau Para Pihak tidak mampu melaksanakan kewajiban”.

Adapun jika timbul permasalahan atau perselisihan, maka perusahaan dan agen akan melakukan mediasi guna mencapai mufakat yang telah diatur dalam Perjanjian Keagenan Pasal 22 yang berbunyi: “Dalam hal terjadi perselisihan dan/atau perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Pelaksanaan Perjanjian ini, maka Agen dan Perusahaan sepakat untuk mengupayakan penyelesaian secara damai melalui jalur musyawarah untuk mufakat”. Dari pasal-pasal yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa kontribusi bagi Perusahaan apabila tidak melaksanakan kewajibannya, tidaklah diatur sedemikian rupa dan seolah tidak memiliki pertanggungjawaban kepada Agen.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama, Proses perjanjian kerja dengan sistem kontrak antara PT Bhinneka Life selaku pemberi kerja dengan agen asuransi yakni perjanjian keagenan tersebut dibuat antara PT Bhinneka Life dengan agen asuransi. Pada dasarnya perjanjian keagenan tersebut termasuk kedalam perjanjian kerja yang didasarkan aturan hukum keperdataan bukan hukum ketenagakerjaan, dan untuk jenis perjanjiannya merupakan perjanjian baku. Adapun untuk proses dan pelaksanaan perjanjian keagenan tersebut, lebih lanjut telah diatur dalam Surat Perjanjian dan juga Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Usaha Perasuransian.

Kedua, Hak dan kewajiban dari masing-masing pihak di dalam perjanjian keagenan dan peraturan yang berlaku di PT Bhinneka Life yaitu hanya diatur beberapa saja yang kebanyakan ditujukan hanya kepada agen. Hal ini dapat dilihat dalam perjanjian keagenan PT Bhinneka Life dalam Pasal 5 tentang kewajiban agen dan Pasal 8 tentang Remunerasi, sedangkan Hak dan Kewajiban Perusahaan asuransi sudah diatur dalam Pasal 11 dan 12 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Usaha Perasuransian. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwasanya regulasi hukum di Indonesia terhadap Usaha Perasuransian bisa dikatakan masih sangat kurang.

Ketiga, Tanggung jawab hukum ketika salah satu pihak antara agen asuransi dan PT Bhinneka Life apabila melanggar perjanjian keagenan tersebut yaitu pihak yang melanggar isi dari perjanjian keagenan harus melakukan ganti kerugian. Dalam Pasal 13 perjanjian keagenan PT Bhinneka Life telah diatur tentang sanksi yang ditujukan kepada agen asuransi, dan Pasal 16 terkait ganti kerugian. Sedangkan terhadap tanggungjawab perusahaan asuransi, dapat dilihat dalam Pasal 73 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Usaha Perasuransian, yang dimana pasal tersebut mengatur mengenai tanggungjawab dan Ketentuan Pidana terhadap perusahaan asuransi. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini tanggungjawab hukum bagi kedua belah pihak sudah diatur dalam regulasi hukum usaha perasuransian di Indonesia.

4.2 Saran

Pertama, Alangkah baiknya dalam melaksanakan proses perjanjian kerja keagenan, perusahaan juga memberikan berbagai macam tambahan fasilitas dan tunjangan kepada agen, Hal ini dikarenakan kedudukan agen yang bukan merupakan tenaga kerja, dan memiliki tanggungjawab serta resiko yang besar, kurang sebanding dengan pendapatan yang didupakannya. Dikarenakan bentuk perjanjian keagenan yang merupakan perjanjian baku yang dimana hal tersebut dapat membebani agen dalam melaksanakan tugasnya, maka perlu adanya suatu jaminan kesejahteraan terhadap agen seperti yang diterapkan bagi tenaga kerja.

Kedua, Terkait hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian keagenan alangkah lebih baiknya apabila dimasukan di dalam perjanjian keagenan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar perjanjian keagenan tersebut lebih bersifat transparan. Sehingga apabila suatu ketika terjadi permasalahan hukum antara keduanya, dapat segera diselesaikan karena perjanjian kerja telah mengatur secara jelas.

Ketiga, Terkait tanggungjawab hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul dalam lingkup keperdataan, alangkah baiknya diselesaikan melalui jalur perdamaian saat mediasi antar pihak. Hal ini dikarenakan apabila permasalahan hukum diselesaikan melalui jalur peradilan, akan memakan banyak waktu dan biaya yang tidak sedikit. Apabila salah satu pihak ternyata diketahui melakukan tindak pidana, maka harus tetap diproses secara hukum pidana sesuai aturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Fajar, Mukti, dan Yulianto, Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hadikusuma, Hilman. (1995). *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju
- Harap-Harap Cemas AJB Usai Diputus Dari Evergreen*, <https://tirto.id/harap-harap-cemas-nasib-ajb-bumiputera-usai-putus-dari-evergreen-cES5>, diakses pada tanggal 7 November 2018, pukul 19.10 WIB

Miru, Ahmadi. (2008). *Hukum Perjanjian & Perancangan Perjanjian*, Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada

Profil, Profil PT Bhinneka Life, <http://bhinnekalife.com/profil/profil-bhinneka-life>
diakses pada tanggal 7 November 2018, pukul: 18.48 WIB

Soekanto, Soerjono. (2006). *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada